
IMPLEMENTASI THE NATIONAL ACTION PLAN TO COMBAT HUMAN TRAFFICKING (NAPCHT) DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DI KANADA TAHUN 2012-2016

Tiara Christin Manoppo¹

Abstract: Human trafficking was a phenomenon where humans are trafficked to other countries illegally. 90 percent of human trafficking cases in Canada involve Canadian citizens or permanent residents. The Canadian government has made several efforts to address the problem of human trafficking in Canada. However, these efforts have not been able to reduce the number of human trafficking. In 2012 the Canadian government established The National Action Plan to Combat Human Trafficking (NAPCHT). This research is using the theories of Implementation of Program and Human Trafficking. The results of this research describe the implementation of The National Action Plan to Combat Human Trafficking (NAPCHT) using four pillars; prevent, protect, prosecution, and partnership and knowledge. In terms of preventing the increase in human trafficking, the Canadian government carries out educational and knowledge activities on the dangers of human trafficking. In an effort to protect victims, the government invests funds to help victims of human trafficking. In terms of prosecuting the perpetrators of these crimes, the Canadian government strengthens the law and carries out prosecutions against Canadians who commit human trafficking offenses within and outside Canada. Then, the government also made partnerships both inside and outside the Canadian government in fighting this crime.

Keywords: Human Trafficking, Canada, Exploitation

Pendahuluan

Perdagangan manusia merupakan salah satu dari banyaknya kejahatan internasional yang terjadi. Hal ini disebabkan karena era globalisasi yang memberikan kemudahan akses ke luar negeri sehingga perdagangan manusia semakin meluas secara transnasional. Perdagangan ini melibatkan perekrutan, pengangkutan, penyembunyian, pengendalian, pengarahan atau pengaruh atas pergerakan seseorang untuk mengeksploitasi korban. Bentuk eksploitasi tersebut biasanya berupa eksploitasi seksual atau kerja paksa. ([Public Safety Canada, 2022](#))

Praktik perdagangan manusia memiliki faktor yang menyebabkan korban masuk dalam perangkap para pelaku perdagangan manusia. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit. Selanjutnya adalah faktor penegak hukum. Kurangnya penegakan hukum, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan manusia, termasuk pemilik, pengelola, perusahaan tenaga kerja merupakan celah hukum yang menguntungkan para pelaku perdagangan manusia. ([DP3AKB Jabar, 2019](#))

Korban perdagangan manusia yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, kehilangan kehidupan normal mereka dan dipaksa untuk memberikan layanan

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, E-mail: tiarachristin26@gmail.com

tenaga kerja atau seksual melalui berbagai praktik pemaksaan, seringkali untuk keuntungan langsung para pelakunya. Adapun orang-orang yang rentan terhadap perdagangan manusia adalah orang-orang dengan tingkat perekonomian yang rendah, korban bencana alam, korban konflik, maupun korban ketidakstabilan politik dalam negeri. (Public Safety Canada, 2022)

Menurut laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), 50% bentuk paling besar dari perdagangan manusia adalah eksploitasi seksual, di mana korbannya sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak (UNODC Report, 2009). World Congress Against the Commercial Sexual Exploitation of Children menegaskan bahwa perdagangan manusia tidak hanya terjadi di negara-negara miskin atau berkembang, tetapi juga di negara maju, termasuk Kanada. (Estes dan Neil, 2001)

Kanada merupakan negara maju yang termasuk dalam Tier 1, yaitu negara yang patuh terhadap standar minimum *Trafficking Victims Protection Acts* (TVPA). Meskipun Kanada termasuk dalam negara yang memenuhi standar dalam memerangi tindakan kejahatan transnasional, fenomena perdagangan manusia di Kanada masih menjadi masalah yang signifikan. Adapun bentuk perdagangan manusia paling besar terjadi di Kanada adalah eksploitasi seksual, dimana sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.

Beberapa teritori di Kanada telah membentuk instrumen tersendiri untuk memerangi perdagangan manusia. Tahun 2007, British Columbia membentuk *Office to Combat Trafficking in Persons* (OCTIP), (British Columbia, 2014) menjadikannya provinsi pertama di Kanada yang melakukan upaya formal dan berkomitmen menyelesaikan masalah perdagangan manusia. Pemerintah provinsi Manitoba juga meluncurkan program yang dikhususkan untuk menanggapi perdagangan manusia, terutama korban anak-anak yang dieksploitasi secara seksual. Program ini adalah *Tracia's Trust*, dibentuk pada tahun 2008 dimana program melingkupi segala bentuk eksploitasi seksual, termasuk prostitusi, pornografi, perdagangan seks, dan wisata seks. Secara nasional, Kanada membentuk *Interdepartmental Working Group on Trafficking in Persons* (IWG-TIP) pada tahun 1999 yang terdiri dari 17 lembaga dan departemen pemerintahan Kanada. Namun, IWG-TIP dinilai gagal dalam melaksanakan tujuan utamanya dan tidak memberikan perkembangan yang signifikan. Oleh sebab itu, IWG-TIP berakhir pada 6 Juni 2012.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, kasus perdagangan manusia masih terus meningkat sehingga pada tahun 2012, pemerintah Kanada membentuk *The National Action Plan to Combat Human Trafficking* (NACPHT) untuk menentang perdagangan manusia. (Public Safety Canada, 2012) NACPHT merupakan rencana aksi yang dibuat oleh pemerintah Kanada pada 6 Juni 2012 untuk menggantikan kegagalan IWG-TIP dengan anggaran empat tahun sebesar \$ 25 juta. Rekomendasi rencana dibagi menjadi empat kategori, yaitu pencegahan, perlindungan, penuntutan dan kemitraan. NACPHT memiliki tujuan mengkonsolidasikan upaya pemerintah federal yang berkelanjutan untuk memerangi perdagangan manusia, memperkenalkan inisiatif baru yang agresif, mengidentifikasi korban, melindungi korban, dan menuntut pelaku.

Seharusnya dengan berbagai upaya yang dilakukan, angka perdagangan manusia di Kanada dapat teratasi. Namun, angka perdagangan manusia terus meningkat sehingga pemerintah Kanada membentuk rencana aksi nasional untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu NACPHT, yang memiliki inisiatif baru dan berbeda dengan program-program terdahulu. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat judul penelitian

“Implementasi The National Action Plan to Combat Human Trafficking (NAPCHT) di Kanada Tahun 2012-2016”.

Kerangka Teori

1. Konsep Implementasi Program

Menurut Pressman dan Wildavksy, implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan (Parson, 2011). Implementasi program atau kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam kebijakan publik. Suatu program harus diimplementasikan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Implementasi dipandang luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang, dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan untuk meraih tujuan program. Grindle menyatakan, implementasi adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dan dana telah siap disalurkan untuk mencapai sasaran (Parson, 2011).

Program merupakan rancangan mengenai asas-asas serta usaha yang akan dijalankan. Charles O. Jones menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones terdapat tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu: (Jones, 1994)

a. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten.

b. Interpretasi

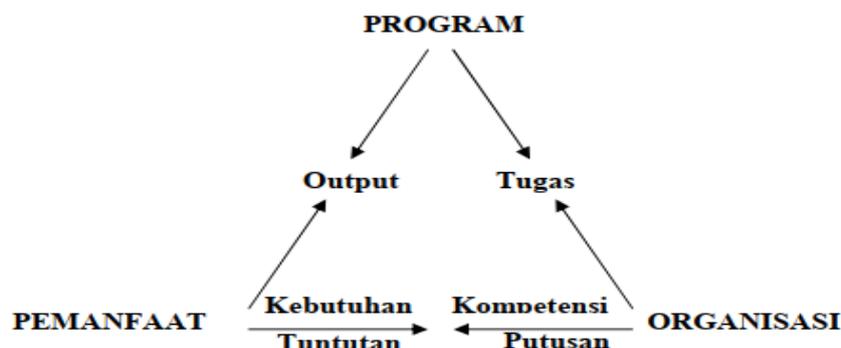
Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

c. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan dan tidak berbenturan dengan program lainnya.

Salah satu model implementasi program adalah model yang dijelaskan oleh David C. Korten. Model ini menggunakan metode proses pembelajaran dan disebut model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 1.2 Model Kesesuaian Implementasi Program



Sumber: Akib, Header dan Tarigan, Antonius. 2000. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya.

Korten menggambarkan model tersebut memiliki tiga unsur dalam realisasi program, yaitu program itu sendiri, realisasi program, dan kelompok sasaran program. Korten mencontohkan, jika rencana tersebut memasukkan tiga unsur dalam pelaksanaannya, maka rencana tersebut akan berhasil. Pertama, kesesuaian antara rencana dan penerima manfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang disediakan rencana dan apa yang dibutuhkan kelompok sasaran (penerima manfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang dibutuhkan dengan perencanaan dan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pengguna dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara persyaratan yang ditentukan oleh organisasi, agar dapat diperoleh keluaran yang direncanakan dari apa yang dapat dilakukan kelompok sasaran yang direncanakan.

Berdasarkan pola pikir Korten di atas, maka dapat dipahami bahwa apabila ketiga unsur pelaksanaan kebijakan tidak sesuai maka kinerja yang direncanakan tidak akan berhasil dicapai. Jika keluaran program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka jelas keluaran tersebut tidak dapat digunakan. Jika kelompok pelaksana program tidak dapat melakukan tugas-tugas yang diperlukan oleh program, kelompok tersebut tidak akan dapat menyampaikan keluaran program dengan benar. Atau, jika kelompok sasaran tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kelompok pelaksana rencana, kelompok sasaran tidak akan dapat memperoleh keluaran yang direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan kesesuaian antara ketiga elemen implementasi kebijakan tersebut, sehingga program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Cheema dan Rondinelli, terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yaitu: (Subarsono, 2005)

- a. Kondisi lingkungan
- b. Hubungan antar organisasi
- c. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program
- d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Empat faktor tersebut dapat mempengaruhi berjalannya suatu program, dengan memperhatikan kondisi-kondisi tersebut diharapkan program akan berjalan sesuai tujuan.

2. Konsep *Human Trafficking*

Asumsi bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara sudah tidak kita ragukan lagi. Tetapi menyatakan bahwa perdagangan manusia hanya urusan lintas negara merupakan suatu kekeliruan karena pada kenyataannya perdagangan manusia juga terjadi dalam konteks lintas negara.

Protokol Parlemo Tahun 2000 mendefinisikan perdagangan manusia sebagai:

- a. Pengertian pertama menurut Protokol Parlemo adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki

kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, minimal, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serta perhambaan atau pengambilan organ tubuh;

- b. Sedangkan yang kedua adalah persetujuan dari korban perdagangan manusia untuk eksploitasi dimaksud ditetapkan dalam sub ayat (a) menjadi tidak relevan jika salah satu cara yang tertera dalam sub ayat (a) telah digunakan. (Ali dan Bayu, 2011)

Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif, sebuah penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran terhadap suatu permasalahan, keadaan, gejala, dan kebijakan serta tindakan secara objektif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, internet, dan jenis data sekunder lain yang saling berkaitan dan dapat menjelaskan fenomena yang diangkat dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi literatur. Penulis memperoleh informasi dengan mengkaji sejumlah literatur yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Literatur diperoleh dari buku, catatan, serta laporan dan artikel baik melalui media cetak ataupun internet. Teknik analisa data dalam proposal ini adalah teknik analisa kualitatif, yaitu penulis menganalisa data sekunder dan kemudian dengan menggunakan teori dan konsep yang sesuai menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti penulis.

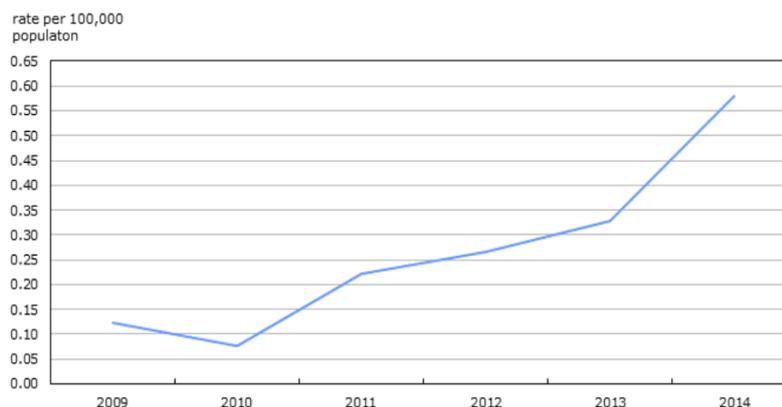
Hasil dan Pembahasan

A. Permasalahan Perdagangan Manusia di Kanada

Secara angka, tingkat perdagangan manusia baik di Kanada maupun internasional sulit untuk didapat karena kejahatan perdagangan manusia cenderung tersembunyi. Selain itu, keengganan korban dan saksi untuk melapor dan menuntut penegakan hukum juga menjadi penyebab semakin sulitnya melacak kejahatan tersebut. Kasus-kasus perdagangan manusia sering tidak diketahui dan tidak dilaporkan karena manipulasi, ketakutan, ancaman dari pedang, rasa malu, hambatan bahasa, atau ketidakpercayaan terhadap pihak berwenang.

Pada tahun 2006, sekitar 600 perempuan dan anak-anak diperdagangkan ke Kanada setiap tahun untuk eksploitasi seksual. Banyaknya pengunjung yang datang dari luar ke Kanada juga berujung pada maraknya wisata seks (ECPAT, 2012). Sedangkan dalam rentang tahun 2009 hingga 2014, terdapat 396 korban perdagangan manusia yang tercatat dalam laporan kepolisian, 93% di antaranya merupakan perempuan, terutama perempuan muda dengan rentang usia 18-24 tahun. (Statistics Canada, 2016)

Gambar 1.1 Perdagangan Manusia di Kanada Tahun 2009-2014



Sumber: Statistics Canada, 2016

Grafik tersebut dihitung berdasarkan persentase perdagangan manusia yang terjadi di Kanada untuk setiap 100.000 jiwa. Artinya, tingkat perdagangan manusia di Kanada tiap 100.000 penduduk berada di bawah satu persen. Meski terjadi penurunan dari tahun 2009 ke 2010, angka perdagangan manusia di Kanada terus meningkat. Antara tahun 2013 ke 2014 bahkan angka kenaikannya cukup signifikan hingga hampir dua kali lipat.

Kanada sebagai negara sumber perdagangan manusia, sebagai negara transit perdagangan manusia, dan sebagai negara tujuan perdagangan manusia. Di mana laki-laki, perempuan dan anak-anak dapat dibeli, dijual, dipaksa atau ditipu untuk memberikan layanan eksploitatif. Seringkali, korban perdagangan manusia dipaksa untuk melunasi hutang kepada pedagang mereka, yang biasa dikenal sebagai jeratan hutang. Jeratan hutang dapat terjadi dalam segala bentuk perdagangan manusia, namun secara global terdapat jenis perdagangan seks dan kerja paksa. (Statistics Canada, 2016)

Berdasarkan penjelasan *Canadian Crime Stoppers*, akar penyebab dan tingginya perdagangan manusia di Kanada meliputi meningkatnya permintaan akan tenaga kerja dan layanan berbiaya rendah, kemiskinan, kurangnya pendidikan dan kesempatan kerja, ketidaksetaraan (berdasarkan gender, kebangsaan), situasi perang dan konflik, dan kerusuhan politik di negara asal. (Canadian Crime Stoppers, 2020)

Meski demikian, Dinas kepolisian Kanada melaporkan 206 pelanggaran perdagangan manusia di Kanada pada tahun 2014. Lebih dari setengah peristiwa perdagangan manusia yang dilaporkan polisi melibatkan pelanggaran lain. Dalam satu peristiwa kriminal, terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan. Antara 2009 dan 2014, ada 506 insiden yang dilaporkan polisi yang melibatkan pelanggaran perdagangan manusia. Analisis ini didasarkan pada data dari Basis Data Tren Survei Pelaporan Kejahatan Seragam berbasis Insiden (2009 hingga 2014) yang mewakili 99% layanan kepolisian di Kanada.

B. Upaya Pemerintah Kanada

Salah satu upaya pemerintah Kanada dalam menekan tingginya angka perdagangan manusia adalah dengan membuat peraturan atau undang-undang. Kanada membentuk undang-undang untuk memberikan pemahaman hukum yang lebih besar tentang tindakan perdagangan manusia. Pada tahun 2005, 4 pasal ditambahkan dalam *Canada's Criminal Code*, antara lain:

- a. Pasal 279.01 tentang perdagangan orang,
- b. Pasal 279.02 tentang penerimaan keuntungan finansial atau keuntungan materil dengan tujuan untuk merencanakan dan memfasilitasi perdagangan orang,
- c. Pasal 279.03 tentang penahanan atau pemusnahan dokumen identitas (seperti paspor) dengan tujuan untuk merencanakan atau memfasilitasi perdagangan orang yang bersangkutan, dan
- d. Pasal 279.04 tentang definisi eksploitasi yang dilakukan dengan tujuan untuk perdagangan manusia.

Pada tahun 2010, pasal 279.011 ditambahkan dalam *Criminal Code*, memperkenalkan pelanggaran baru yang secara khusus berkaitan dengan perdagangan orang di bawah 18 tahun. Kemudian pada tahun 2012, *Criminal Code* diamandemen sehingga warga Kanada dan penduduk tetap dapat dituntut di Kanada apabila melakukan kejahatan perdagangan manusia yang dilakukan di luar Kanada atau secara internasional.

Tahun 2014, subagian baru ditambahkan ke *Criminal Code*, memasukkan pelanggaran khusus untuk menerima keuntungan materi dari perdagangan orang di bawah usia 18 tahun dan untuk menahan atau memusnahkan dokumen untuk memfasilitasi atau melakukan; perdagangan orang di bawah usia 18 tahun. Hukuman wajib minimum dimasukkan untuk bagian 279.01 serta setiap tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan korban anak-anak.

C. The National Action Plan to Combat Human Trafficking

The National Action Plan to Combat Human Trafficking merupakan rencana aksi yang ditetapkan oleh pemerintah Kanada pada tanggal 6 Juni 2012. Awal mula pembuatan rencana aksi ini adalah pada tahun 2004, *The Government's Interdepartmental Working Group on Trafficking in Persons* diberi mandat untuk membuat rencana nasional anti-perdagangan manusia, tetapi mandat tersebut tidak terpenuhi meskipun ada peringatan dari politisi dan organisasi non-pemerintah (LSM). Sebelum pembentukan *National Action Plan*, berbagai organisasi termasuk First Nations, korban perdagangan manusia, penegak hukum dan penyedia layanan korban mengkritik Kanada karena gagal memiliki rencana semacam itu.

Dalam rangka mengatasi perdagangan manusia, pemerintah Kanada menggunakan empat pilar pendekatan, yaitu:

1. *Prevent*, pemerintah Kanada melakukan upaya pencegahan termasuk dukungan, pengembangan dan kampanye informasi dan kesadaran terhadap bahaya kejahatan perdagangan manusia.
2. *Protect*, pemerintah Kanada melakukan upaya dengan membantu korban kejahatan perdagangan manusia dengan memberikan layanan yang tanggap terhadap kebutuhan korban, dan termasuk pemulihan fisik, psikologis, dan sosial mereka.
3. *Prosecution*, pemerintah Kanada melanjutkan upaya untuk membawa para pelaku perdagangan manusia ke pengadilan untuk memperkuat sistem peradilan pidana terhadap kejahatan ini.
4. *Partnership*, pemerintah Kanada mengembangkan kemitraan yang kuat baik di dalam maupun di luar pemerintah federal dalam memerangi kejahatan ini.

The National Action Plan to Combat Human Trafficking diyakini lebih unggul dari kebijakan sebelumnya dikarenakan rencana aksi nasional ini mengusulkan strategi yang lebih mendukung organisasi yang memberikan bantuan kepada para korban dan membantu melindungi warga negara asing, termasuk imigran perempuan muda yang tiba di Kanada sendirian, dari pekerjaan yang tidak sah atau tidak aman. Lalu, *The National Action Plan to Combat Human Trafficking* yang dibangun sebagai respon serta komitmen untuk memerangi perdagangan manusia dan bekerja sama dengan mitra domestik Kanada maupun internasional. Sehingga, rencana aksi nasional ini disinyalir memberikan inisiatif baru yang agresif untuk mengatasi perdagangan manusia dalam segala bentuknya. (Public Safety Canada, 2012)

D. Implementasi *The National Action Plan to Combat Human Trafficking* (NAPCHT) di Kanada Tahun 2012-2016

The National Action Plan mengkonsolidasikan upaya berkelanjutan dari pemerintah federal Kanada untuk memerangi perdagangan manusia. Hal ini dilakukan dengan memperkenalkan inisiatif baru yang agresif untuk mencegah perdagangan manusia, mengidentifikasi korban, melindungi yang paling rentan, dan menuntut pelaku. Pemerintah Kanada berfokus pada empat pilar yang sejalan dengan praktik terbaik di mana diterima secara internasional yaitu prevention of human trafficking (pencegahan perdagangan orang), protection of victims (perlindungan korban), prosecution of offenders (penuntutan pelanggar), working in partnership with others both domestically and internationally (bekerja dalam kemitraan dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri). (Ali dan Bayu, 2011)

Dalam hal interpretasi, pemerintah Kanada menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan agar program tercapai. Dalam hal penerapan atau aplikasi, pemerintah Kanada telah membuat prosedur kerja yang jelas, yaitu dengan merumuskan empat pilar pendekatan sehingga pengimplementasian program dapat terlaksana. Pengimplementasian *The National Action Plan to Combat Human Trafficking* (NAPCHT) oleh pemerintah Kanada dijelaskan sebagai berikut.

Prevent

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Kanada telah melakukan kegiatan yang berfokus pada pencegahan, termasuk dukungan, pengembangan dan kampanye informasi dan kesadaran untuk memajukan strategi pencegahan praktis di masyarakat di seluruh negeri. Pandangan pemerintah bahwa prostitusi menjadikan mereka yang rentan menjadi korban dan permintaan akan layanan seksual menjadi penyebab utama perdagangan manusia.

Pemerintah Kanada melakukan promosi pelatihan untuk penyedia layanan garis depan di bawah *The National Action Plan*. (Ali dan Bayu, 2011) Selanjutnya, pemerintah Kanada mengembangkan halaman web baru dan yang disempurnakan dalam pembaruan mencakup 12 hal tentang upaya, sumber daya, materi kesadaran dan agenda Pemerintah Kanada. Disamping itu, pemerintah Kanada juga menyelaraskan kampanye pendidikan, informasi dan kesadaran nasional dan mengembangkan kampanye yang disesuaikan untuk khalayak tertentu. Kampanye yang termasuk di dalamnya seperti “*Truckstop*” campaign untuk mencegah

perdagangan manusia yang bertujuan eksploitasi seksual; distribusi kampanye “*I’m Not for Sale*” dari *Royal Canadian Mounted Police* termasuk ke komunitas besar *First Nations*, *Inuit*, dan *Métis*; kampanye pemuda; terakhir distribusi materi kesadaran di kedutaan dan konsulat Kanada. (Ali dan Bayu, 2011)

Selain itu, pemerintah Kanada membagikan materi kesadaran di kedutaan Kanada dan komisi tinggi di luar negeri. Termasuk juga bekerja sama dengan Kewarganegaraan dan Imigrasi Kanada untuk memperbarui dan menerjemahkan ke dalam lima (5) bahasa asing brosur yang menginformasikan sementara pekerja asing, termasuk pelajar internasional yang mungkin bekerja di Kanada mengenai hak-hak mereka dan memberikan informasi kontak penting. (Ali dan Bayu, 2011)

Pemerintah Kanada juga berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mengidentifikasi orang dan tempat yang paling berisiko. Hal ini dilakukan dengan cara mengembangkan alat diagnostik nasional dan lokal untuk membantu identifikasi populasi dan tempat-tempat yang paling berisiko terhadap perdagangan manusia di Kanada. Selain itu, alat ini akan mengumpulkan informasi tentang bentuk-bentuk eksploitasi terkait, dan mengidentifikasi sumber daya dan mengisi inventarisasi praktik pencegahan. Upaya ini akan menginformasikan strategi pencegahan di tingkat nasional dan lokal, serta memungkinkan penargetan upaya pencegahan yang lebih baik. (Ali dan Bayu, 2011)

Terakhir, pemerintah Kanada memperkuat *Child Protection Systems* (Sistem Perlindungan Anak) dalam program Badan Pembangunan Internasional Kanada yang menargetkan anak-anak dan remaja. Pemerintah Kanada melalui strategi tersebut mendukung mitra internasional untuk meningkatkan kapasitas untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia dengan mengembangkan alat, sumber daya dan dengan memberikan pelatihan untuk melengkapi mitra dengan benar. Hal ini guna untuk meninjau dan merancang program dengan pertimbangan risiko migrasi yang tidak aman dan perdagangan manusia. Selain itu, pemerintah Kanada juga memastikan investasi termasuk dukungan untuk perempuan berbasis masyarakat dan mekanisme perlindungan pemuda, memastikan investasi dalam pendidikan termasuk penggabungan sistematis kurikulum yang menangani migrasi yang aman dan skenario perdagangan manusia, serta memastikan pencatatan kelahiran disertakan dan dipromosikan dalam kerangka kerja mitra bilateral. (Ali dan Bayu, 2011)

Protect

Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Kanada untuk orang-orang yang diperdagangkan mencakup beberapa hal, termasuk imigran perempuan berusia 15 tahun hingga 21 tahun. Pertama, dibutuhkan identifikasi korban perdagangan pada waktu yang tepat untuk memastikan keselamatan dan pemisahan mereka dari pedagang mereka, serta untuk menyediakan akses ke kebutuhan perawatan kesehatan secepatnya. Seperti yang diketahui bahwa pemerintah Kanada mengutuk semua bentuk kerja paksa, termasuk eksploitasi yang terkait dengan perdagangan manusia. Oleh karena itu, baik warga negara asing maupun pekerja Kanada berhak mendapat manfaat dari upaya pemerintah Kanada, provinsi dan wilayah yang memiliki tanggung jawab untuk penegakan standar perburuhan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan hubungan perburuhan di dalam yurisdiksi masing-masing.

Prosecution

Pemerintah Kanada melanjutkan upaya untuk membawa para pelaku pedagang ke pengadilan untuk memperkuat sistem peradilan pidana terhadap kejahatan ini. Investigasi tindak pidana di Kanada dilakukan di tingkat federal, provinsi atau kota, dan petugas polisi dan jaksa memiliki berbagai alat yang tersedia bagi mereka untuk membawa pelaku perdagangan ke pengadilan. Teknik investigasi seperti operasi penyamaran atau pengawasan elektronik diizinkan dalam hukum Kanada dan merupakan alat yang sangat berharga dalam investigasi perdagangan manusia. Polisi juga memanfaatkan informasi yang dikumpulkan oleh departemen dan lembaga seperti Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada yang dapat memberikan intelijen keuangan mengenai kemungkinan pencucian uang oleh tersangka penyelundup manusia.

Partnership dan Knowledge

Aksi pemerintah Kanada dalam *Partnership and Knowledge* yaitu Meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi dengan masyarakat sipil, termasuk organisasi Aborigin, dan semua tingkat pemerintahan untuk mendukung pertukaran pengetahuan, memperkuat kemitraan, dan menginformasikan tanggapan kebijakan; bermitra dengan organisasi internasional dan pemerintah asing untuk meningkatkan kapasitas mencegah dan memerangi perdagangan manusia; mempromosikan kerjasama melalui instrumen hukum yang berlaku dan timbal balik; menggunakan keterlibatan diplomatik untuk mempromosikan kemitraan dan kebijakan regional dan internasional di wilayah-wilayah di dunia yang sangat rentan terhadap perdagangan manusia; terus mempromosikan koordinasi antara Haiti dan Republik Dominika, bekerja sama dengan PBB, IOM dan organisasi lain dan negara-negara yang berpikiran sama, dalam upaya untuk mengatasi perdagangan manusia dan melindungi populasi yang rentan, terutama perempuan dan anak-anak.

Dari keempat pilar yang telah dijalankan oleh pemerintah Kanada, *prosecution* dinilai sebagai pilar yang paling efektif, dimana melalui pilar ini, pemerintah Kanada melakukan upaya untuk mendeteksi dan menyelidiki kasus perdagangan manusia dengan lebih baik dan membawa pelaku ke pengadilan. Kasus-kasus perdagangan manusia untuk semakin sering diidentifikasi, dan semakin banyak tuntutan diajukan di seluruh Kanada. Jumlah pemindaan dan kasus di pengadilan meningkat tiga kali lipat sejak 2012, dari 102 kasus menjadi 300 lebih kasus di pengadilan pada 2016. Hal ini disebabkan oleh adanya upaya penyadaran dan pelatihan di semua sektor, termasuk dalam sistem peradilan pidana (yaitu polisi, jaksa dan hakim), serta intelijen yang berbagi informasi dalam upaya penegakan hukum.

Kesimpulan

Dalam memberantas perdagangan manusia di Kanada, pemerintah Kanada mengimplementasikan *The National Action Plan to Combat Human Trafficking* yang dipercaya lebih unggul dari kebijakan sebelumnya dikarenakan rencana aksi nasional ini mengusulkan strategi yang lebih mendukung organisasi yang memberikan bantuan kepada para korban dan membantu melindungi warga negara asing. Melalui pendekatan empat pilar di dalamnya yaitu prevent, protect, prosecution dan partnership.

Tidak hanya itu, rencana aksi ini juga disinyalir memberikan inisiatif baru yang agresif untuk mengatasi perdagangan manusia dalam segala bentuknya.

Dalam segala upaya yang dijalankan oleh pemerintah Kanada, rencana aksi ini membuktikan dapat membantu melindungi individu dari segala bentuk perdagangan manusia dan memperkenalkan pendekatan yang lebih seimbang, holistik dan berpusat pada korban. Dalam hal mencegah meningkatnya kejahatan ini, pemerintah Kanada melakukan kegiatan edukasi dan pengetahuan terhadap bahaya perdagangan manusia. Dalam upaya perlindungan terhadap korban, pemerintah melakukan investasi dana guna membantu korban perdagangan manusia. Dalam hal menindak pelaku kejahatan ini, pemerintah Kanada memperkuat undang-undang dan melakukan tuntutan terhadap warga Kanada yang melakukan pelanggaran perdagangan manusia di dalam maupun luar Kanada. Kemudian, pemerintah juga melakukan kemitraan baik di dalam maupun di luar pemerintah Kanada dalam melawan kejahatan ini.

Daftar Pustaka

- Charles O. Jones.1994. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: PT. Rajagrafindo PersadaPublic Safety Canada, “About Human Trafficking” tersedia di <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/cntrng-crm/hmn-trffckng/abt-hmn-trffckng-en.aspx>
- DP3AKB Jabar. 2019. “Praktek Perdagangan Manusia dan Permasalahannya Ditinjau dari Sosiologi Hukum”. Tersedia di <https://dp3akb.jabarprov.go.id/official/praktek-perdagangan-manusia-dan-permasalahannya-ditinjau-dari-sosiologi-hukum/>
- ECPAT. 2012. “Canada”. Tersedia di <https://beyondborders.org/en/home/>
- “Government Initiatives for Trafficked Persons” tersedia di <https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/human-trafficking/human-trafficking-training/module-2/government-initiatives> diakses pada 14 September 2022UNODC, report on human trafficking exposes modern form of slavery. <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html>
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, Perdagangan Orang “Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. Hal 19Richard J. Estes and Neil Alan Weiner. 2001. The commercial sexual exploitation of children in the US, Canada and Mexico. University of Pennsylvania
- Public Safety Canada. 2012. “National Action Plan to Combat Human Trafficking”. Tersedia di <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrscs/pblctns/ntnl-ctn-pln-cmbt/index-en.aspx>
- Statistics Canada. 2016. “Trafficking in Person in Canada, 2014”. Tersedia di <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2016001/article/14641-eng.htm#c2>

Statistics Canada. "Trafficking in persons in Canada, 2014". Tersedia di <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2016001/article/14641-eng.htm#c1>

Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. "The Harper Government Launches Canada's National Action Plan to Combat Human Trafficking". Public Safety Canada .2012

Wayne Parson, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2011, hal 466